



RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN  
KAB. LABUHANBATU SELATAN  
**2021- 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021- 2026.

Rencana Strategis OPD ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 - 2026 ini memperhatikan analisis capaian kinerja tahun lalu dan kebijakan-kebijakan yang dari Pemerintah Pusat serta dokumen – dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan adanya berbagai hambatan baik dari segi data maupun sumber daya manusianya. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Dengan segala kerendahan hati, kami menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

s

Kotapinang,      Maret 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dr. DONNY IRWAN SYAH DALIMUNTHE, MKM  
PEMBINA Tk. II / IV/b  
NIP. 19760119 200502 1 001



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN .....</b>	<b>7</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan .....	16
2.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan .....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	33
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.....	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	35
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS         KESEHATAN.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS         KESEHATAN.....</b>	<b>54</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan sektoral harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap kesehatan (*health in all policies*).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama.

Periode 2021 -2026 merupakan tahapan akhir RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025. Sasaran pembangunan dalam periode ke IV RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan diarahkan kepada mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai daerah agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di daerah terutama pertanian dalam arti luas, pertambangan, pariwisata serta industri kecil menengah dan besar. Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor pertanian dalam arti luas sebagai motor penggerak yang didukung oleh sektor industri, dan pariwisata serta mewujudkan iklim investasi yang membaik melalui peningkatan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat

Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (*topdown*), dan bawah-atas (*bottom-up*).

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Indonesia Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

34. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sasaran Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah untuk meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kesehatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Kesehatan
2. Menjadi acuan resmi bagi Dinas Kesehatan serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan Bidang Kesehatan
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

Bab ini berisi Uraikan tugas dan fungsi PD, Ringkasan berbagai sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Gambaran capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, dan Penjelasan terkait tantangan dan peluang pengembangan pelayan (program) Perangkat Daerah di periode yang direncanakan.



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Uraikan secara ringkas VISI, MISI dan PROGRAM dari Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Menguraikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan VISI, MISI dan PROGRAM dari Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian VISI, MISI dan PROGRAM dari Kepala Daerah Terpilih dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Menjelaskan isu strategis (permasalahan prioritas) yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah periode yang direncanakan.

### **BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN**

Pada bagian ini berisi tentang pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dirumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dirumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dirumuskan INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

##### **A. DINAS KESEHATAN**

1) Tugas :

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupnten dalam lingkup kebijakan teknis, koordinasi, advokasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, sinkronisasi dan sinergisitas di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendailian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan dan tugas pembantuan.

2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penyusunan dan penyempurnaan, penetapan, pengaturan, pembinaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi, advokasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan teknis pembangunan kesehatan tingkat provinsi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan tingkat kabupaten;
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pembinaan pembangunan kesehatan jangka menengah dan tahunan tingkat provinsi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan Kabupaten terhadap perencanaan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- c. Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kecamatan dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan di Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan

- struktural dan jabatan fungsional, serta standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja Dinas;
- f. Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal dinas dan pelaksanaan penegakan hukum/hukum kesehatan;
  - h. Penyelenggaraan pembinaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan dan pembangunan kesehatan tingkat kabupaten;
  - i. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan rencana kerja Dinas;
  - j. Penyelenggaraan pengendalian Tugas dan Fungsi Dinas serta pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis;
  - k. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - l. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - m. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

## **B. SEKRETARIAT**

### 1) Tugas :

Sekretariat mempunyai tugas membantu dinas dalam penyelenggaraan urusan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan program kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten;

### 2) Uraian tugas Sekretariat :

- a. Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum perkantoran dan rumah tangga dinas dan manajemen organisasi kesehatan;
- c. Melaksanakan penatausahaan, pelembagaan, pengorganisasian dan penatalaksanaan;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
- e. Melaksanakan penataan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan dinas dan inventaris rumah tangga dinas;
- f. Melaksanakan penyusunan dan penataan standar tata hubungan kerja dan standar mekanisme koordinasi antar unit dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan/tata konsep dan pengelolaan perpustakaan;

- h. Melaksanakan pengelolaan hubungan kemasyarakatan, informasi publik dan keprotokolan;
- i. Melaksanakan fasilitasi pelayanan umum, pelayanan minimal, pengaturan keamanan dan kenyamanan kantor;
- j. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi kepegawaian;
- k. Melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan dan perbendaharaan;
- m. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, anggaran dan pelaporan dinas;
- n. Melaksanakan pengkajian anggaran belanja dan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- o. Melaksanakan pengkajian, pemetaan dan evaluasi peruntukan anggaran belanja dan aset dinas serta melaksanakan penghitungan belanja kesehatan dari seluruh sumber pembiayaan dan dari seluruh sektor terkait kesehatan tingkat kabupaten;
- p. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja sekretariat, bidang-bidang dan unit pelaksana teknis dinas;
- q. Melaksanakan pengkajian dan koordinasi perencanaan program bidang, sekretariat dan unit pelaksana teknis dinas; r. Melaksanakan penyusunan perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dinas;
- s. Melaksanakan pengkoordinasian pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan sekretariat dan bidang-bidang serta unit pelaksana teknis dinas;
- t. Melaksanakan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan sinkronisasi perencanaan Kabupaten terhadap perencanaan tingkat kabupaten;
- u. Melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan;
- v. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, mengatur rapat-rapat internal dinas dan melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Dinas.

### 3) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan dinas;
- b. Penyelenggara administrasi umum di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan serta menyusun pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- e. Penyelenggara urusan rumah tangga dinas; dan

- f. Pelaksana tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

### **C. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT**

1) Tugas :

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas bidang kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan kesehatan keluarga; upaya peningkatan kesehatan gizi masyarakat dan gizi keluarga, serta pengendalian dan penanggulangan penyakit akibat kekurangan dan kelebihan gizi, penanganan kesehatan usia lanjut, dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat tingkat kabupaten;
- b. Pelaksanaan upaya-upaya peningkatan mutu manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berbasis pencegahan penyakit, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan tingkat kabupaten;
- c. Pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat dengan penggunaan metode, sarana dan teknologi promosi kesehatan, dan pengembangan unit khusus promosi kesehatan berbasis teknologi informasi dan media yang terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan;
- d. Pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan serta peningkatan upaya fasilitasi, advokasi dan pendampingan masyarakat, Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) tingkat kabupaten;
- e. Melaksanakan upaya-upaya peningkatan kesehatan lingkungan, sanitasi dasar, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan tempat-tempat umum, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah tingkat kabupaten;
- f. Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pengawasan kualitas lingkungan kerja dan industri, penyehatan kawasan kerja dan industri, dan penanganan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta pengembangan kesehatan olah raga tingkat kabupaten;

- g. Melaksanakan pengembangan Distric Team Problem Solving (Tim Pemecah masalah Kabupaten) Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (DTPS KIBBLA) tingkat kabupaten;
- h. Melaksanakan pengembangan manajemen Puskesmas berbasis akreditasi;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu manajemen institusi kesehatan pemerintah dan swasta terkait dengan upaya-upaya kesehatan masyarakat, sesuai dengan standar mutu manajemen yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- l. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

#### **D. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT**

##### 1) Tugas :

Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa.

##### 2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan, Penyiapan pelaksanaan kebijakan, Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi, Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pelaksanaan surveilans epidemiologi, kekarantinaan kesehatan, penanggulangan dan/atau penyelidikan kejadian luar biasa (KLB), wabah, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit menular vektor, penyakit zoonotik, penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
- b. Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit yang menimbulkan epidemi;
- c. Pelaksanaan imunisasi dan pencapaian UCI (*Universal Child Immunization*);
- d. Penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa;
- e. Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana yang meliputi kesiap-siagaan, mitigasi dan kesiap-siagaan, tanggap darurat dan pemulihan;

- f. Pelaksanaan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- g. Penyelenggaraan upaya kesehatan matra;
- h. Pelaksanaan pengintegrasian teknologi informasi pencegahan dan pengendalian penyakit berbasis sistem informasi kesehatan terkoordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **E. BIDANG PELAYANAN KESEHATAN**

### 1) Tugas :

Bidang pelayanan kesehatan mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

### 2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional dan khusus serta pemenuhan standar pelayanan kesehatan primer, tradisional dan khusus tingkat kabupaten;
- b. Pelaksanaan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi pelayanan kesehatan rujukan/spesialistik, sistem rujukan, pelayanan kesehatan rujukan perkotaan; dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rujukan tingkat kabupaten;
- c. Pelaksanaan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan berupa kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, pembiayaan kesehatan tingkat Kabupaten;
- d. Inventarisasi, pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi, koordinasi, advokasi, dan penegakan sanksi, terhadap penyusunan, penyempurnaan dan penerapan/pelaksanaan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, tata laksana, standar, Standard Operating Procedure (SOP), kebijakan, regulasi, perda/ranperda, norma, kriteria ataupun ketentuan lainnya dalam penanganan urusan bidangnya;

- e. Penyusunan, penyempurnaan dan pengendalian penerapan/pelaksanaan dokumen teknis rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan staf, standar teknis tata hubungan kerja organisasi dan indikator kinerja bidangnya;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
- g. Melakukan analisis, pemetaan, penelitian, kajian-kajian dan study ilmiah manajemen pembangunan dan kebijakan kesehatan terkait bidangnya dan pengintegrasian sistem teknologi informasi dalam penanganan urusan bidangnya;
- h. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan fasilitasi peningkatan kapasitas, kompetensi dan kemandirian Kabupaten dalam penanganan urusan bidangnya;
- i. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan rencana tahunan, dan koordinasi penyusunan program, anggaran, penyediaan data, informasi dan mensinkronisasikan perencanaan Kabupaten terhadap perencanaan tingkat kabupaten dalam penanganan urusan bidangnya;
- j. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup bidangnya dan penyelenggaraan arahan dan bimbingan kepada pejabat struktural di bidangnya;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
- l. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- m. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

## **F. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN**

### 1) Tugas :

Bidang sumber daya kesehatan mempunyai tugas membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, PKRT dan sarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan.

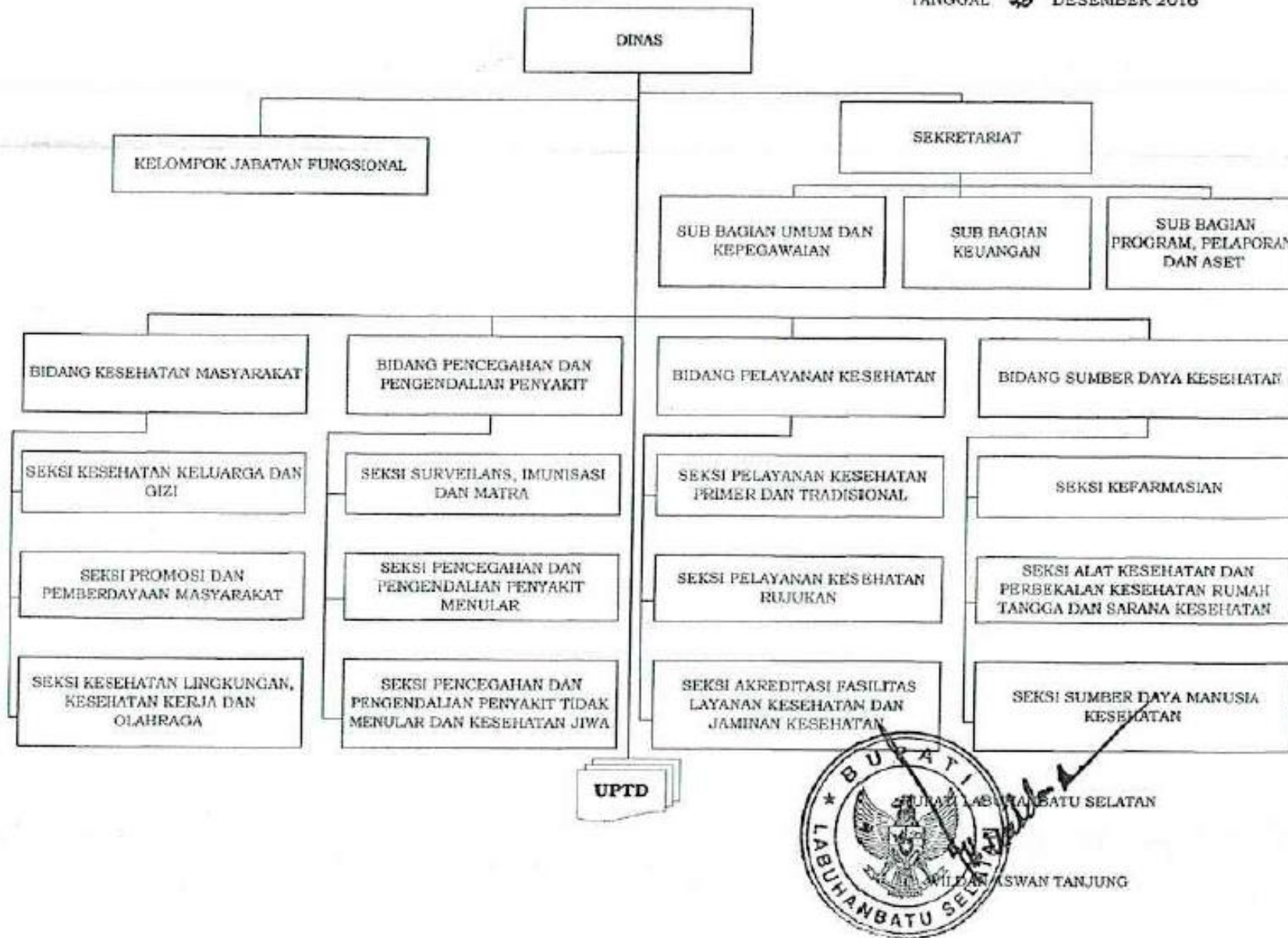
### 2) Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas bidang pendidikan sekolah dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penanganan urusan kefarmasian, dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT); industri komoditi kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang, obat tradisional, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, kosmetika, makanan, minuman;



- b. Pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, reagensia, vaksin dan ketersediaan obat;
- c. Pelaksanaan penanganan urusan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
- d. Pelaksanaan urusan-urusan dalam ruang lingkup yang meliputi perencanaan, pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya manusia kesehatan; pengembangan pendidikan berjenjang, pendidikan pelatihan kepemimpinan/manjerial, fungsional dan teknis kesehatan, serta kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan lainnya;
- e. Pelaksanaan registrasi dan rekomendasi tenaga kesehatan warga negara asing dan pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar kabupaten, pemberdayaan organisasi profesi tenaga kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan;
- f. Pelaksanaan pengintegrasian teknologi informasi pelayanan kesehatan berbasis sistem informasi kesehatan terkordinasi dengan bidang-bidang kerja terkait lainnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) dan sarana kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan;
- i. Pengkoordinasian bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan; dan
- l. Pelaksana tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.



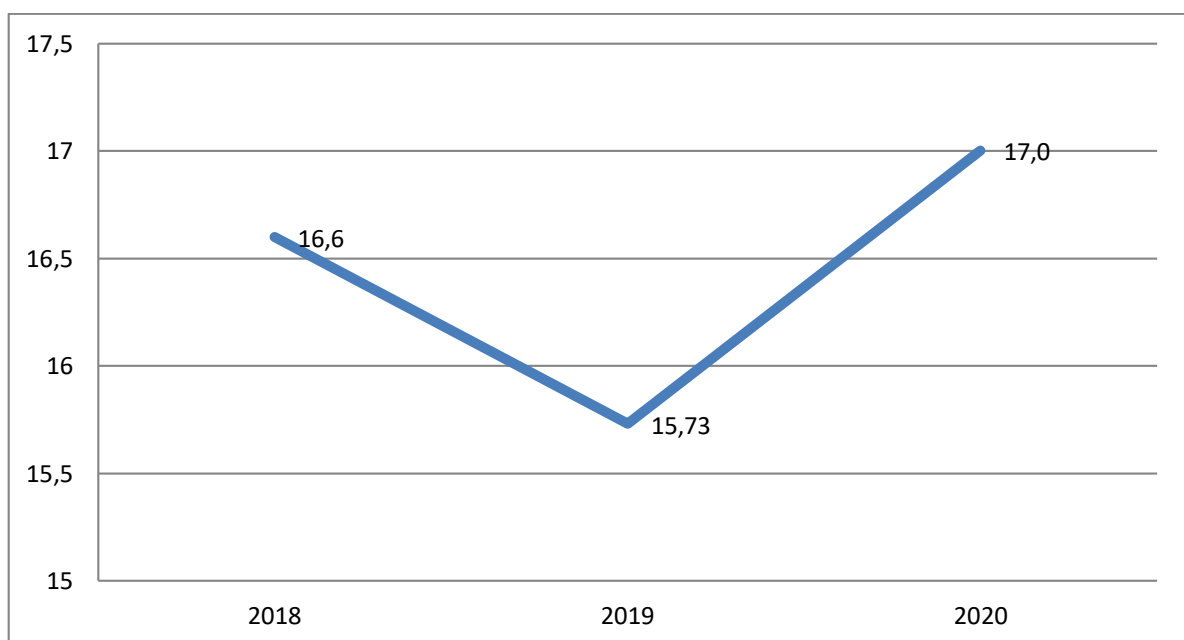
## 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan

### 2.2.1 Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan kesehatan menurut UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan. Jumlah anggaran sektor kesehatan yang bersumber APBD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit) tahun 2020 sebesar Rp. 162.247.274.504 ,- atau sekitar 17% dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada tahun 2020 total anggaran Kesehatan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar Rp. 657.365. 041.084,- dimana dari total anggaran kesehatan yang ada, maka sumber anggaran dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki proporsi paling besar yaitu (84,75%), APBN memberikan kontribusi sebesar 9,51% berupa dana DAK untuk Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit, Persentase anggaran kesehatan lima tahun terakhir seperti tampak pada grafik di bawah ini.

**Proporsi Anggaran Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan**



Grafik di atas menggambarkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor Kesehatan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari persentase alokasi anggaran untuk kesehatan termasuk gaji sudah diatas 10%, meskipun setiap tahunnya terlihat fluktuatif. Untuk mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar, maka Dinas Kesehatan beserta jajarannya masih perlu melakukan advokasi untuk membiayai program-program kesehatan yang ada sehingga anggaran kesehatan diluar gaji bisa lebih dari 10% dari APBD Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### 2.2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan tugas dan fungsi dari organisasi SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memerlukan berbagai jenis tenaga kesehatan yang bergerak bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Tenaga kesehatan tersebut harus dapat memahami prinsip paradigma sehat yang mengutamakan upaya peningkatan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta pelatihan tenaga yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dan masyarakat.

Kondisi sumber daya manusia berdasarkan status ketenagaan baik yang ada di UPTD Puskesmas, secara umum dapat kita lihat pada tabel berikut :

### Ketersediaan SDM Puskesmas Kab. Labuhanbatu Selatan Tahun 2021

No.	Nama Faskes	Tenaga Kesehatan																				Total							
		Dokter				Dokter Gigi				Keperawatan				Kebidanan				Kefarmasian				Kesehatan Masyarakat				PNS		Non PNS	
		PNS		NON PNS		PNS		NON PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	LANGGA PAYUNG	1	2	0	1	0	0	0	0	3	10	4	8	0	27	0	25	0	1	0	1	0	0	1	1	4	40	5	36
2	HUTA GODANG	0	3	0	0	0	0	0	0	2	4	2	6	0	66	0	26	0	1	0	1	0	1	0	3	2	75	2	36
3	CIKAMPAK	0	2	0	1	0	1	0	0	1	3	0	2	0	24	0	7	0	2	0	0	0	2	0	0	1	34	0	10
4	AEKBATU	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	1	1	0	11	0	8	0	1	0	0	0	0	0	2	1	20	1	12
5	BERINGIN JAYA	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	28	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	34	0	1
6	AEKRASO	0	1	0	0	1	0	0	0	3	5	1	2	0	21	0	12	0	1	1	0	0	0	0	0	4	28	2	14
7	BUNUT	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	1	2	0	6	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	3	11	2	4
8	RASAU	1	0	0	2	1	0	0	0	1	1	2	0	0	3	0	10	0	1	0	0	0	3	0	0	3	8	2	12
9	BATUAJO	0	1	1	1	1	0	0	0	3	3	2	1	0	11	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	4	18	3	4
10	KOTAPINANG	1	1	1	1	0	3	0	1	2	2	1	9	0	19	0	18	0	1	0	0	1	1	0	0	4	27	2	29
11	SISUMUT	1	2	1	0	0	1	0	0	1	3	0	3	0	6	0	12	0	1	0	1	0	0	0	0	2	13	1	16
12	MAMPANG	1	1	0	1	0	0	0	0	0	5	2	6	0	16	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	1	23	2	27
13	AEKGOTI	0	1	0	0	0	1	0	0	4	8	2	8	0	14	0	16	0	1	0	0	0	3	0	0	4	28	2	24
14	ULUMAHUAM	1	1	0	0	0	2	0	0	3	4	3	4	0	10	0	19	0	1	0	0	0	0	0	1	4	18	3	24
15	TANJUNG MEDAN	0	1	0	0	1	0	0	0	2	5	2	2	0	14	0	10	0	1	0	0	1	0	0	0	4	21	2	12
16	TELUK PANJI	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	17	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	22	1	2
17	PEKANTOLAN	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	2	0	13	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	0	7

No.	Nama Faskes	Tenaga Kesehatan																				Total				
		Kesehatan Lingkungan				Gizi				Keterampilan Fisik				Keteknisian Medis				Teknik Biomedika				PNS		Non PNS		
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
1	LANGGA PAYUNG	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
2	HUTA GODANG	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
3	CIKAMPAK	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
4	AEKBATU	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	
5	BERINGIN JAYA	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	1	
6	AEKRASO	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	
7	BUNUT	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	
8	RASAU	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	
9	BATUAJO	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	
10	KOTAPINANG	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	
11	SISUMUT	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
12	MAMPANG	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
13	AEKGOTI	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	
14	ULUMAHUAM	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
15	TANJUNG MEDAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	
16	TELUK PANJI	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	
17	PEKANTOLAN	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	1	

Dari tabel- tabel diatas kita dapat melihat keadaan eksisting (terkini) SDM dengan kategori Tenaga Kesehatan dari 17 (tujuhbelas) Puskesmas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Informasi yang diperoleh dari tabel tersebut adalah bahwasanya sampai dengan hari ini keadaan SDM di Puskesmas wilayah Kerja kabupaten Labuhanbatu Selatan masih terdapat penumpukan jenis tenaga tertentu disatu Puskesmas tapi dilain pihak Puskesmas lain kekurangan tenaga tersebut. Contohnya pada Puskesmas Hutagodang, yang memiliki tenaga Kesehatan Bidan PNS sebanyak 66 (enam puluh enam ) orang, sementara pada Puskesmas Bunut dan Rasau hanya memiliki 3 (tiga) dan 6 (enam) tenaga Kesehatan Bidan PNS.

No.	Nama Faskes	Tenaga Penunjang							
		Struktural				Dukungan Manajemen			
		PNS		Non PNS		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	LANGGA PAYUNG	0	1	0	0	0	0	2	1
2	HUTA GODANG	0	1	0	0	1	0	3	0
3	CIKAMPAK	0	2	0	0	0	0	2	1
4	AEK BATU	0	1	0	0	0	1	2	1
5	BERINGIN JAYA	2	0	0	0	0	0	3	0
6	AEK RASO	1	0	0	0	0	0	1	1
7	BUNUT	0	2	0	0	0	0	3	0
8	RASAU	0	1	0	0	0	0	2	1
9	BATU AJO	1	0	0	0	0	0	2	1
10	KOTAPINANG	0	1	0	0	0	0	3	1
11	SISUMUT	0	1	0	0	0	0	2	1
12	MAMPANG	0	1	0	0	0	0	3	1
13	AEK GOTI	0	2	0	0	0	0	2	1
14	ULU MAHUAM	0	1	0	0	0	0	2	1
15	TANJUNG MEDAN	0	1	0	0	0	0	1	1
16	TELUK PANJI	1	1	0	0	0	0	3	0
17	PEKAN TOLAN	0	2	0	0	0	0	2	1

Dari tabel diatas diperoleh informasi keadaan SDM dengan kategori tenaga penunjang, yakni Struktural dan Dukungan Manajemen.

Struktural disini adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha, sedangkan dukungan manajemen adalah Juru Mudi, Penjaga Malam dan juga Penjaga Kebersihan di Puskesmas. Dapat dilihat bahwasanya tenaga dukungan manajemen status kepegawaiannya mayoritas adalah non PNS, dan kita ketahui juga bahwa ada beberapa Puskesmas yang belum memiliki Kepala Tata Usaha yang mengurus administrasi kepegawaian di Puskesmas. Sehingga tugas tersebut dilimpahkan kepada salah satu tenaga Kesehatan sebagai tugas tambahan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020, pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan terhadap 73 indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja, hasilnya dapat terlihat pada tabel berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-			Capaian Kinerja Pada Tahun			Proyeksi 2021
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
	<b>AKSES MUTU PELAYANAN KESEHATAN</b>							
1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin	92%	93%	94%	100%	100%	100%	95%
2	Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas	40%	50%	50%				50%
3	jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	4 Pusk	4 Pusk	1 pusk				2 pusk
4	Jumlah Sarana Swasta yang dibina dan diawasi dalam pengolahan bahan pangan	50%	60%	70%				70%
5	persentase penduduk yang menjadi peserta JKN	45%	45%	50%	49,85%	52,85%	60,52%	50%
6	Jumlah calon Haji yang mendapat pelayanan kesehatan lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
7	Persentase Penduduk Miskin yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan	70%	80%	80%	57,83%	5,65%	66,94%	80%
	<b>UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT</b>							
10	Persentase desa siaga aktif	59%	61%	62%				65%
11	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	49%	53%	57%			51,48%	60%
	<b>UPAYA KESEHATAN IBU</b>							
12	Persentase Ibu hamil KEK dan Anemia mendapatkan PMT	48%	50%	55%				60%
13	Cakupan Persalinan ditolong Nakes	88%	89%	90%	88%	85%	87%	90%
14	Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)	94%	95%	95%	88%	84%	86%	95%
15	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi ditangani	79%	80%	80%	37%	34%	0%	80%
16	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	90%	92%	95%	82%	82%	84%	95%
17	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN Lengkap)	90%	95%	95%				95%
18	Penanganan komplikasi kebidanan	79%	80%	80%	37%	34%	0%	80%
19	Penanganan komplikasi Neonatal	79%	80%	80%	34%	50%	41%	80%
20	Persentase Ibu hamil yang mendapat tablet Fe	90%	90%	90%	88%	84%	84%	90%
	<b>UPAYA KESEHATAN ANAK</b>							
21	Persentase Bayi Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	55%	55%	60%	24,29%	21,70%	32,04%	60%
22	Persentase gizi buruk yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-			Capaian Kinerja Pada Tahun			Proyeksi
23	Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang	21%	20,50%	20%	3,9%	8,2%	4,6%	20%
24	Cakupan Rumah Tangga Yang mengkonsumsi garam beryodium	87%	87%	89%				89%
25	Persentase anak usia 6-59 yang mendapat Vitamin A	84%	85%	86%	97%	96%	91%	88%
26	Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	90%	90%	90%	58,77%	47,88%	71,48%	90%
27	Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)	90%	95%	100%	89%	96%	90%	100%
28	Cakupan kunjungan bayi	92%	93%	93%				93%
29	Cakupan pelayanan anak balita	89%	90%	90%	86%	83%	74%	90%
	<b>KESEHATAN LINGKUNGAN</b>							
30	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	59%	61%	62%				65%
31	Persentase Keluarga menghuni rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan	60%	65%	70%				75%
32	Persentase keluarga menggunakan air bersih	60%	65%	70%	0%	0%	0%	75%
33	Persentase keluarga yang memiliki jamban sehat	60%	65%	70%	77%	79%	79%	75%
34	Persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	79%	80%	85%	51%	56%	69%	85%
35	Jumlah Desa STBM	54 desa/ke 	54 desa/ke 	54 desa/ke 	0	0	0	54 desa/ke 
36	Jumlah Desa Stop BAB Sembarangan	54 desa/ke 	54 desa/ke 	54 desa/ke 		16 Pusk	16 Pusk	54 desa/ke 
	<b>PENGENDALIAN PENYAKIT</b>							
37	Persentase penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB < 24 Jam pada desa/ke yang terjadi KLB	100%	100%	100%				100%
38	Persentase Desa/ke yang melakukan penanganan dan penanggulangan wabah dan Bencana	54 Desa/ke 	54 Desa/ke 	54 Desa/ke 				55 Desa/ke 
39	Angka Case Detection Rate Penyakit TB	87%	88%	89%	93%		90%	89%
40	Angka Keberhasilan Pengobatan TB	≥95%	≥95%	≥95%	11,29	50,36	38,75	≥95%
41	Cakupan Penemuan dan Tatalaksana Pneumonia pada balita	40%	45%	50%	1,6%	0%	0%	50%
42	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta per 100.000 penduduk	<5/100.000 penduduk	<5/100.000 penduduk	<5/100.000 penduduk	0,3	1,475	3,50	<5/100.000 penduduk
43	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	46/100.000 penduduk	46/100.000 penduduk	45/100.000 penduduk	1,5	7,38	4,4573	45/100.000 penduduk

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-			Capaian Kinerja Pada Tahun			Proyeksi
		uk	k	uk				
44	Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 penduduk	0,6/1.000 penduduk	0,6/1.000 penduduk	0,5/1000 penduduk	0	0	0	0,5/ 1000 penduduk
45	Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	95%	95%	97%	86%	83%	83%	97%
46	Persentase anak sekolah dasar (BIAS) yang mendapatkan imunisasi	96%	97%	97%				97%
47	Angka Non Acute Flaccid (AFP) pada anak usia <15 thn per 100.000 penduduk	2/1000 penduduk	2/1000 penduduk	2/1000 penduduk				2/1000 penduduk
48	Persentase penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB <24 jam pada desa/kel yang terjadi KLB	100%	100%	100%				100%
49	Persentase Pusk yang melakukan penanganan wabha dan bencana	17 pusk	17 pusk	17 pusk				17 pusk
50	persentase puskesmas yang melaksanakan surveilance deteksi dini KIE Penyakit Tidak Menular	19 Pusk	20 Pusk	21 Pusk				22 Pusk
	<b>SARANA KESEHATAN</b>							
51	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	3 pusk	4 pusk	4pusk	6 pusk	4 Pusk	0 Pusk	13 Pusk
52	Jumlah Puskesmas yang dilengkapi fasilitas bangunannya	3 Pusk	3 Pusk	1 pusk				4 pusk
53	Jumlah Puskesmas keliling	3 unit	3 unit	3 unit				1 unit
54	Jumlah Puskesmas yang dilengkapi Sarana dan Prasarananya	3 Pusk	3 Pusk	1 pusk				4 pusk
55	Jumlah Puskesmas Pembantu yang dilengkapi sarana dan prasarananya	6 Pustu	6 Pustu	6 Pustu				6 Pustu
56	Jumlah puskesmas Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	17 Pusk	17 Pusk	17 Pusk				17 pusk
57	Jumah puskesmas pembantu yang Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	6 Pustu	6 Pustu	6 Pustu				6 Pustu
58	Jumlah Puskesmas Pembantu yang di Rehabilitasi sedang/berat	3 Pusk	3 Pusk	1 pusk				4 pusk
59	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sedang/berat	6 Pustu	6 Pustu	6 Pustu				6 Pustu
60	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	1 unit	1 unit	1 unit	0	0	0	
61	Jumah Poskesdes yang diadakan sarana dan Prasarana	10 poskesdes	10 poskesdes	12 poskesdes				10 Poskesedes
62	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi sedang/berat	2 pusk	2 pusk	2 pusk				2 pusk
63	jumlah puskesmas yang menerapkan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar	19 pusk	20 pusk	21 pusk				22 pusk



No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-			Capaian Kinerja Pada Tahun			Proyeksi
64	Jumlah Puskesmas Mampu PONED	3 Pusk	3 Pusk	3 Pusk	0	0	0	3pusk
65	Jumlah Puskesmas Santun Usila	17 Pusk	17 Pusk	17 Pusk	0	0	0	17 Pusk
	<b>KESEHATAN USIA LANJUT</b>							
66	Cakupan Pelayanan kesehatan usia lanjut	70%	75%	75%	83%	41%	31%	80%
67	Umur Harapan Hidup	67 Tahun	68 Tahun	69 Tahun	68,39	68,64	68	70 Tahun
	<b>SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>							
68	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100%	100%	100%				100%
69	Jumlah Pelatihan Kesehatan	18 Orang	18 Org	18 Orang				18 Orang
70	rasio tenaga medis per puskesmas	70%	80%	90%				90%
	<b>STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)</b>							
1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	-	100%	100%	-	84%	85%	100%
2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	-	100%	100%	-	83%	83%	100%
3	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	-	100%	100%	-	82%	87%	100%
4	Persentase Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapaka	-	100%	100%	-	103%	60%	100%
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100%	100%	-	80%	83%	100%
6	Persentase orang usia 15-59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	-	100%	100%	-	19%	4%	100%
7	Persentase warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	-	100%	100%	-	69%	74%	100%
8	Persentase penderita hipertensi usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100%	100%	-	18%	29%	100%

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-			Capaian Kinerja Pada Tahun			Proyeksi
9	Persentase penderita diabetes mellitus usia >= 15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100%	100%	-	27%	37%	100%
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	100%	100%	-	16%	112%	100%
11	Persentase orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	-	100%	100%	-	101%	44%	100%
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	-	100%	100%	-	11%	10%	100%

Dari Tabel capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2020 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam indikator akses mutu pelayanan kesehatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Persentase ketersediaan obat dan vaksin capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% dengan target sebesar 94%, hal ini disebabkan oleh adanya dukungan anggaran dari DAK Fisik dan DBH CHT terhadap pengadaan obat dan Bmhp di Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, akan tetapi perlu lagi dicermati dalam hal pengadaan obat dan bmhp yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas sehingga tidak terjadinya obat atau bmhp yang kadaluarsa di Puskesmas dikarenakan obat dan bmhp tersebut tidak dibutuhkan puskesmas.
  - Persentase penduduk yang menjadi peserta JKN di Kabupaten Labuhanbatu selatan pada tahun 2020 mencapai 60,52% dengan target sebesar 50%. Capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN sebesar 20,69% dan PBI APBD Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 7,06% sedangkan Non PBI (Pekerja Penerima Upah, Mandiri dan Bukan Pekerja) sebesar 32,77%.
  - Jumlah calon haji yang mendapat pelayanan kesehatan lengkap pada tahun 2020 tidak tercapai karena adanya pembatalan pemberangkatan jemaah haji indonesia yang berdampak pembatalan jemaah keberangkatan jemaah haji Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19.
  - Persentase Penduduk Miskin yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 66,94% dengan target sebesar 80%, indikator ini tidak tercapai dikarenakan anggaran APBD yang terbatas untuk mencover iuran PBI APBD. Hal disebabkan adanya kenaikan iuran PBI APBD kelas III sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menjadi Rp. 42.000,- perbulannya dan untuk peserta PBPU kelas 3 yang sebelumnya Rp. 42.000 berubah menjadi Rp25.500 dengan ketentuan adanya bantuan dari pemerintah untuk kelompok masyarakat ini. Pada dasarnya, iuran peserta kelas 3 tetap Rp42 ribu, namun ada porsi yang dibayar oleh masyarakat dan ada yang dibayarkan oleh pemerintah sebagai bentuk bantuan.

- b. Dalam Indikator Upaya Kesehatan Masyarakat yaitu dengan indikator Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri dengan capaian sebesar 51,5% dengan target sebesar 57 sehingga indikator ini belum tercapai. Namun demikian semua Posyandu berjalan dengan baik walaupun dimasa pandemik. Posyandu dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sebagian ada yang dilaksanakan di puskesmas secara bergantian (jika jarak posyandu dengan Puskesmas dekat/terjangkau oleh masyarakat).
- c. Dalam indikator kelompok Kesehatan Ibu, beberapa indikator yang belum tercapai, antara lain :
  - Indikator cakupan ibu hamil dengan komplikasi ditangani di Kab. Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 36,9% dan target sebesar 80%. Tidak tercapainya indikator ini dikarenakan kurangnya kompetensi bidan dalam tatalaksana penanganan kasus gawat darurat pada ibu hamil. Tatalaksana penanganan kasus gawat darurat perlu dilakukan untuk mendeteksi ibu hamil yang berisiko. Selain itu, kurangnya koordinasi antara dinas kesehatan dengan BPM/BPS/RS/Klinik/Praktik dr. SPOG dalam pencatatan dan pelaporan. Kurangnya sarana/prasarana yang mendukung pelayanan Antenatal seperti; reagen pemeriksaan haemoglobin, kertas lakmus (untuk pemeriksaan protein urin), stik pemeriksaan Kadar Gula Darah (KGD). Refocusing anggaran dengan adanya pandemi Covid-19 pada Tahun 2020 juga mengakibatkan tidak berjalannya kegiatan-kegiatan Dinas Kesehatan dalam monitoring dan evaluasi terkait cakupan ibu hamil dengan komplikasi ditangani.
  - Penanganan komplikasi kebidanan adalah ibu hamil, bersalin, dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONEK, RB, RSIA/RSB, RSUD, RSUD PONEK). Tahun 2020, capaian penanganan komplikasi kebidanan di Kab. Labuhanbatu Selatan sebesar 36,9% dengan target sebesar 80%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain; Kompetensi SDM (Bidan) yang kurang, sarana dan prasarana yang tidak memadai dalam penangananan komplikasi kebidanan (*set kegawatdaruratan maternal*), kurangnya koordinasi antara dinas kesehatan

dengan BPM/BPS/RS/Klinik/Praktik dr. SPOG dalam pencatatan dan pelaporan. Selain itu, tidak anggaran untuk pelatihan SDM kesehatan (bidan), pengadaan alat/sarana/prasarana, dan monitoring evaluasi terkait penanganan komplikasi kebidanan terlebih lagi adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19.

- Penanganan komplikasi neonatal adalah neonatal dengan komplikasi disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Capaian Penanganan komplikasi kebidanan di Kab. Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 sebesar 41% dengan target sebesar 80%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain; SDM (Bidan) yang tidak kompeten dalam melakukan tatalaksana penanganan kasus gawat darurat pada neonatal, sarana dan prasarana (**set kegawatdaruratan neonatal**) yang tidak tersedia dalam menunjang penanganan komplikasi neonatal. Sistem pencatatan dan pelaporan otopsi verbal di puskesmas belum lengkap, hal ini dikarenakan kurangnya kompetensi bidan dalam mengisi format pelaporan otopsi verbal. Tim AMP (Audit Maternal Perinatal) di Kab. Labuhanbatu Selatan belum ada sampai saat ini, sementara Tim AMP sangat perlu dibentuk untuk mencegah kesakitan atau kematian serupa dimasa yang akan datang. Pandemi covid-19 mengakibatkan refocusing anggaran, sehingga penganggaran terkait pengadaan pencatatan dan pelaporan otopsi verbal dan kegiatan monitoring dan evaluasi ke puskesmas tidak dapat dilaksanakan.

d. Dalam Upaya Kesehatan Anak, beberapa indikator yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, antara lain :

- Indikator persentase Bayi Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kab. Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 32,04% dan target sebesar 60%. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh SDM kesehatan (promkes) dan Kader posyandu yang kurang kompetensi dalam melakukan penyuluhan ASI eksklusif kepada masyarakat, koordinasi antar lintas sektor juga masih kurang. Belum disosialisasikannya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 50 Tahun 2018 Selatan tentang ASI eksklusif ke puskesmas-puskesmas serta sanksi jika tidak memberikan ASI eksklusif juga belum tercantum dalam peraturan tersebut. Selain itu, pencatatan laporan bayi Usia 0-6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif belum lengkap.
- Target Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan Kurang tahun 2020 di Kab. Labuhanbatu Selatan adalah 20%, dan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 4,6%. Angka ini menunjukkan bahwa Prevalensi Balita dengan Gizi Buruk dan

Kurang, jauh dibawah target, walaupun pencapaian yang diharapkan belum 0%. Beberapa hal yang mendukung penurunan Balita dengan gizi buruk dan kurang antara lain; SDM kesehatan (petugas gizi) yang sudah terlatih dalam sistem pencatatan dan pelaporan, koordinasi yang baik antara bidan, kader, dan aparat desa. Selain itu, Fasilitas penunjang (antropometri) juga sudah ada di setiap puskesmas serta didukung dengan anggaran yang cukup.

- Capaian kinerja terkait Balita ditimbang berat badannya (D/S) tahun 2020 di Kab. Labuhanbatu Selatan sebesar 71,48% dan belum mencapai target sebesar 90%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kompetensi bidan dan kader posyandu dalam melakukan penyuluhan sehingga masyarakat juga menjadi kurang informasi/pengetahuan terkait pentingnya melakukan penimbangan Berat Badan setiap bulan walaupun bayi sudah selesai vaksin diusia 9 bulan, kepedulian masyarakat terhadap perkembangan & pertumbuhan balitanya masih kurang, perlunya refresing petugas gizi terhadap pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Selain itu, Pandemic covid 19, menyebabkan pembatasan melakukan aktivitas diluar rumah, sehingga ibu-ibu yang memiliki bayi tidak melakukan penimbangan Berat Badan bayinya terlebih jika imunisasi sudah lengkap. Refocusing dana mengakibatkan monitoring dan evaluasi ke puskesmas tidak dilakukan.
  
- e. Dalam Upaya kesehatan lingkungan dapat dijelaskan penyebab indikator tercapai dan tidak tercapai, antara lain :
  - Tahun 2020 capaian Persentase keluarga yang memiliki jamban sehat di Kab. Labuhanbatu Selatan sudah mencapai target yaitu 79%. Hal ini disebabkan adanya dukungan dana APBD dan DAK non fisik pada Tahun 2020. Tersedianya akses sanitasi, tidak diikuti dengan capaian jumlah desa yang Stop BABS. Jumlah desa yang sudah stop BABS hanya 16 desa dari 54 desa. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat untuk BAB disungai, di kebun, dan diplastik. Selain itu, kurangnya kompetensi sanitarian dalam merubah perilaku masyarakat dan belum ada regulasi/perbup/perda terkait stop BABS serta adanya refocussing anggaran guna penanganan pandemi covid-19, sehingga kegiatan-kegiatan program seperti refreshing kader, monitoring dan evaluasi ke puskesmas tidak dapat dilakukan.
  - Persentase keluarga menggunakan air bersih di Kab. Labuhanbatu Selatan tahun 2020 dengan capaian sebesar 54% dan target sebesar 70%. Belum tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; analisa kemampuan petugas sanitarian dalam memahami dan melaksanakan Permenkes No. 492 dan Permenkes No. 736 tahun 2010 belum maksimal yang

disebabkan masih kurangnya sosialisasi Permenkes tersebut kepada petugas sanitarian. Pandemi covid-19, mengakibatkan petugas sanitarian/kesling tidak bisa melaksanakan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) terkait pengawasan kualitas air minum. Ketersediaan alat dan reagent (sanitarian kit) belum optimal, dari 17 puskesmas hanya 5 puskesmas yang memiliki sanitarian kit. Sosialisasi/pelatihan kepada sanitarian juga masih kurang terkait cara penggunaan water test kit. Selain itu, adanya refocusing anggaran, mengakibatkan kegiatan-kegiatan program seperti peningkatan kompetensi petugas sanitarian/kesling, pengadaan reagen pemeriksaan kualitas air minum, surveilans kualitas air minum rumah tangga dan monitoring/evaluasi ke puskesmas tidak dapat dilakukan.

- Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat kesehatan di Kab. Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 69% dengan target sebesar 85%. Belum tercapainya dikarenakan kemampuan/kapasitas petugas sanitarian/kesling masih kurang dalam pelaksanaan pengawasan TFU. Sosialisasi, Koordinasi dan advokasi masih belum pernah dilakukan di wilayah Kab. Labuhanbatu Selatan. Selain itu, adanya refocusing anggaran mengakibatkan monitoring dan evaluasi ke puskesmas terkait pengawasan TFU yang memenuhi syarat kesehatan dan peningkatan kapasitas petugas tidak terlaksana.

f. Indikator dalam Upaya kesehatan usia lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi: edukasi PHBS dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Capaian Cakupan Pelayanan kesehatan usia lanjut di Kab. Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020 sebesar 31 % dengan target sebesar 75%. Belum tercapainya indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : adanya pandemi covid-19 mengakibatkan posyandu lansia tidak terlaksana setiap bulannya dan kunjungan rumah yang terhambat. Selain itu, ketersediaan sarana/prasarana/fasilitas penunjang program lansia belum maksimal, seperti stik KGD, kolesterol, asam urat, lansia kit, form instrument skrining kesehatan usia lanjut, buku kesehatan lansia. Kurangnya kompetensi SDM kesehatan (pemegang program) dalam melakukan pengisian form instrument skrining kesehatan (*Geriatric Depression Scale, Abbreviated Mental Test, Activity Daily Living*), hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada SDM kesehatan (pemegang program) terkait pengisian form instrument skrining kesehatan. Pergantian pemegang program Lansia

- Belum ada satupun Puskesmas yang Santun Usila di Kab. Labuhanbatu Selatan pada tahun 2020, hal ini dikarenakan oleh SDM (dokter, dokter gigi, perawat, tenaga gizi, promkes) yang belum mendapat pelatihan teknis terkait pelayanan kesehatan lansia dan belum adanya SDM (tenaga keterampilan fisik, pekerja sosial yang sudah dilatih gerontology, psikolog) di Puskesmas dan kader yang belum terlatih serta Tidak adanya anggaran yang mendukung Sarana dan Prasarana santun usila di puskesmas. Adapun syarat Bangunan/Prasarana Puskesmas Santun Usila :
  - Pendaftaran lanjut usia sebaiknya terpisah dengan pasien umum.
  - Ruang tunggu untuk pasien Lanjut Usia berada di dekat ruangan pemeriksaan
  - Pemeriksaan dan konsultasi bagi pasien Lanjut Usia sebaiknya dilakukan di ruangan khusus untuk lanjut usia, tapi bila tidak memungkinkan dilakukan di ruangan pemeriksaan umum dengan mendahulukan lanjut usia.
  - Ruang untuk Kegiatan Lanjut Usia (Latihan fisik/ senam Lanjut Usia, Latihan fisik sesuai kebutuhan individu/kelompok, Terapi okupasi sesuai kebutuhan individu/kelompok, Pemberian makanan tambahan, Penyuluhan kesehatan, Sosialisasi dan aktivitas bermanfaat menstimulasi kognitif (day care). Jika tidak memungkinkan, kegiatan lanjut usia dapat menggunakan ruangan rapat, ruangan promosi kesehatan atau di halaman Puskesmas.
  - WC/Toilet khusus Lanjut Usia (menggunakan WC duduk, jika perlu dengan peninggian, Lantai tidak licin dan tidak timbul genangan, terdapat pegangan di dinding WC/toilet, Dilengkapi dengan bel, pintu membuka keluar.
  
- g. Ada beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang belum tercapai, antara lain :
  - Capaian Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai SPM di Kab. Labuhanbatu Selatan belum tercapai, sementara target SPM adalah 100%. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: pelayanan kesehatan (pendataan/penjaringan, skrining kesehatan) anak usia pendidikan dasar hanya dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS), sedangkan pelayanan kesehatan (pendataan/penjaringan, skrining kesehatan) diluar satuan pendidikan dasar seperti panti/LKSA, Lapas/LPKA belum pernah dilakukan. Anggaran yang mendukung Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar belum ada seperti; Pembentukan kader kesehatan remaja (konselor sebaya), Pelatihan konselor sebaya, pembuatan sertifikat pelatihan, Pengadaan formulir

rekapitulasi hasil skrining kesehatan usia pendidikan dasar, Pelatihan/sosialisasi pengisian formulir skrining kesehatan, Pengadaan UKS Kit, Pengadaan buku pencatatan dan transportasi petugas puskesmas). Selain itu, koordinasi dengan pihak Lapas belum ada terkait Lapas khusus anak.

- Capaian pelayanan kesehatan usia produktif di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan sebesar 100%, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan Keluarga Berencana

Tahun 2020, jumlah PUS di Kab. Labuhanbatu Selatan sebanyak 57.150 orang, namun yang menjadi peserta KB aktif hanya 17.441 orang. Masih rendahnya peserta KB aktif di Kab. Labuhanbatu Selatan disebabkan oleh beberapa hal antara lain; kurangnya edukasi pelayanan KB Pasca Persalinan (KBPP). Sarana/prasarana pendukung pelayanan KB masih kurang seperti pengadaan formulir skrining kesehatan, media-media penyuluhan/leaflet).

2. Pelayanan Catin,

Pelayanan calon pengantin di Kab. Labuhanbatu Selatan masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh kurangnya KIE kepada catin tentang kesehatan reproduksi dan skrining kesehatan bagi calon pengantin (pemeriksaan status gizi). Kurangnya koordinasi dan belum ada MoU antara puskesmas dengan KUA terkait pelayanan catin. Pengetahuan tenaga kesehatan (pemegang program) dalam pengisian laporan catin juga masih kurang, sehingga perlu dilakukan kembali sosialisasi/pelatihan. Belum ada **anggaran untuk penguatan Kesehatan Reproduksi** (calon pengantin, Akseptor KB, penghuni lapas dewasa, penyandang disabilitas, Pencegahan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tidak semuanya berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dari adanya kesenjangan antara capaian program dan kegiatan dengan target yang diharapkan. Adapun tantangan yang ditemukan diantaranya adalah :

### **1. Masalah sumber daya manusia**

Masih adanya puskesmas yang belum memenuhi 9 (sembilan) tenaga kesehatan, yaitu dari 17 Puskesmas, masih 5 puskesmas yang memenuhi ketentuan tersebut sedangkan 12 puskesmas lagi belum memenuhi ketentuan tersebut.



## **2. Masalah Pembiayaan**

Dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD sangat minim, masih sangat bergantung anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan. Pada Anggaran Tahun 2021, besaran dana APBD hanya untuk kegiatan berupa Gaji dan Tunjangan PNS serta Gaji Tenaga dengan Perjanjian Kerja sebesar 48,73%, Anggaran PBI APBD dan Bantuan Iuran Mandiri kelas III sebesar 9,58%, Anggaran Kapitasi JKN Puskesmas sebesar 13,15% dan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar 27,73%, sedangkan sisanya sebesar 0,81% untuk kegiatan rutin operasional kantor. Jadi untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan serta upaya kesehatan esensial di Puskesmas masih bergantung dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan.

## **3. Masalah Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 2011 s/d 2015 masih belum mencapai target yang diharapkan. Rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk adalah dari tahun 2011 s.d 2015 adalah 2,37, hal ini masih di bawah target yang diharapkan, yakni 3,33 per 100.000 penduduk.

Sedangkan rasio puskesmas pembantu terhadap 100.000 penduduk tertinggi adalah 6.03 pada tahun 2015, hal ini masih jauh di bawah target yang diharapkan, yakni 20,0 per 100.000 penduduk.

## **4. Masalah Perencanaan**

Belum optimalnya perencanaan dengan menggunakan “evidence base” karena adanya masalah dalam sistem pencatatan dan pelaporan. “Bottom up Planing” belum dapat berjalan dengan optimal karena kemampuan dalam membuatnya belum maksimal, perencanaan dinas kesehatan yang tertuang dalam renstra ini merujuk pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan diaplikasikan dalam renja tiap tahun secara bertahap.

## **5. Masalah Peran Serta Masyarakat**

Kurangnya pembinaan Peran Serta Masyarakat, masyarakat tidak tertarik dengan upaya kesehatan karena kurangnya pengetahuan akan kesehatan, ini disebabkan antara lain karena kurangnya penyebarluasan informasi kesehatan. Daerah yang masih tidak terjangkau informasi, masih berpegang pada “aturan lama” dimasyarakat yaitu kebiasaan dan tidak semua aturan tersebut memiliki korelasi positif dengan upaya kesehatan.

## **6. Pandemi covid-19 yang masih terus berlangsung**

Kasus covid-19 yang terkadang meningkat menyebabkan terbatasnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga menghambat pemenuhan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh.

Selain tantangan tersebut di atas, dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Visi dan Misi Bupati Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026 yang mendukung pelayanan dasar bidang kesehatan, yaitu Visi: “**Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat**”, pada Misi 2 : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.
2. Teknologi dan informasi yang berkembang memudahkan pelayanan dan promosi kesehatan ke seluruh lapisan masyarakat.
3. Kelembagaan yang terstruktur dengan baik memudahkan koordinasi dan segala urusan.
4. Adanya forum silaturahmi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dapat memberikan banyak sumbangan baik dalam hal perencanaan maupun peningkatan peran serta masyarakat
5. Dengan Indikator Pembangunan Manusia maka kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten, hal ini akan banyak memberikan kemudahan bagi pelaksanaan program kesehatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan peran serta masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**

#### **DINAS KESEHATAN**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan**

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kesehatan di Kabupaten dapat diidentifikasi faktor faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan di kabupaten Labuhanbatu Selatan. Faktor internal terbagi menjadi faktor kekuatan dan kelemahan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun faktor kekuatan (Strengths) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan Dasar (Puskesmas dan jaringannya) sudah mencakup semua kecamatan.
2. Rasio Tenaga kesehatan lebih tinggi dibanding tenaga non kesehatan
3. Tersedianya Sarana mobilitas pelayanan kesehatan
4. Alokasi anggaran kesehatan bersumber APBD Kabupaten telah mencapai 10%

Sedangkan faktor kelemahan (Weaknesses) yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Rasio SDM bidang kesehatan per 100.000 penduduk masih rendah
2. Penyebaran tenaga kesehatan masih belum merata
3. Rasio Puskesmas dan Jaringannya belum memenuhi target per 100.000 penduduk

Faktor eksternal terbagi menjadi faktor peluang (opportunities) dan tantangan (threats) dari luar Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun faktor peluang (opportunities) yang telah diidentifikasi adalah :

1. Dengan Indikator Pembangunan Manusia maka kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten, hal ini akan banyak memberikan kemudahan bagi pelaksanaan program kesehatan
2. Adanya peraturan baru, rekrutmen pegawai dapat dilakukan oleh Kabupaten.
3. Adanya forum silaturahmi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa dapat memberikan banyak sumbangan baik dalam hal perencanaan maupun peningkatan peran serta masyarakat.
4. Adanya komitmen global dari stakeholder (CSR) dalam pembangunan kesehatan.

Sedangkan faktor tantangan (threats) yang telah diidentifikasi adalah:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi (8,04 thn 2015).

2. Prevalensi Balita gizi buruk (sangat kurus) masih tinggi (0,54 % thn 2013)
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Desa Siaga Aktif belum maksimal, karena walaupun cakupan desa siaga aktif pada tahun 2015 telah mencapai 95,34% tetapi sebagian besar masih strata pratama.
4. Adanya budaya masyarakat yang tidak mendukung upaya kesehatan.
5. Prevalensi Penyakit menular masih tinggi, dan prevalensi penyakit tidak menular mulai tinggi
6. Cakupan Sarana Sanitasi Dasar masih rendah

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pembangunan di kabupaten labuhanbatu Selatan pada tahap ketiga Rencana Pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020-2025 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang termasuk juga mempertimbangkan berbagai isu global, nasional dan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan rumusan dan penetapan arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk memantapkan landasan pembangunan secara menyeluruh terutama pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan daya saing daerah serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta mempertimbangkan budaya yang hidup di dalam masyarakat, maka visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2020-2025 yang hendak dicapai dalam tahapan ketiga pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:

**“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”.**

#### **5.1.2 Penjelasan Misi**

1. Mewujudkan masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis.
2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.
3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui Perluasan Lapangan Kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata.
6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terutama yang tertuang dalam misi 4 yaitu Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan.

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara**

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Adapun sasaran POKOK RPJMN 2020-2024 adalah :

**Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing**

Untuk itu telah ditetapkan arah kebijakannya adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif dengan di dukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Adapun strategi RPJMN 2020-2024 untuk mencapainya adalah :

1. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ((germas)
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan adalah “Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat”. Untuk itu dalam upaya mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 -

2023, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara merumuskan tujuan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, yaitu **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**. Adapun sasaran jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023, **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”**

Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara menetapkan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak
2. Meningkatnya status gizi masyarakat
3. Menurunnya angka kematian

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 UU 26/2007. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Dasar hukum rencana tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 – 2037 . Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 – 2037, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan telah ditetapkan sebagai berikut :

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Kondisi yang belum menjadi masalah saat ini tetapi berpotensi akan menjadi masalah daerah dalam kurun waktu mendatang dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola. Potensi ini jika dapat dikelola dengan dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kesehatan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kesehatan, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kesehatan dapat disimpulkan isu-isu strategis bidang kesehatan, yaitu:

1. Pandemi covid-19 yang terus berlangsung sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan.  
Isu pandemi covid-19 ini merupakan prioritas karena keberadaannya sangat mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat serta kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita
3. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu, balita, remaja, dan lansia.  
Pelayanan kesehatan pada ibu, balita, remaja dan lansia belum maksimal sehingga diperlukan upaya khusus agar kinerja pelayanan memenuhi target SPM.
4. Perbaiki gizi masyarakat yang belum optimal.  
Kasus balita gizi buruk dan stunting masih ditemukan di masyarakat. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang serta faktor ekonomi yang menghambat pemenuhan kebutuhan gizi keluarga.
5. Angka Penemuan TB yang masih rendah  
Rendahnya Angka Penemuan TB disebabkan oleh belum optimalnya kunjungan rumah untuk skrining dalam penemuan terduga TB. Sebagian masyarakat yang terduga TB

masih enggan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan apalagi dengan adanya pandemi covid-19 mulai awal tahun 2020.

6. Kualitas lingkungan dan sanitasi yang masih rendah.

Masih adanya masyarakat yg blm mempunyai jamban sehat (Belum terpenuhinya 100% akses jamban sehat).

7. Belum optimalnya pelaksanaan UKBM (posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, poskestren, UKK dan kelurahan siaga aktif mandiri).



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN**

Dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada misi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tetap mengikuti visi dan misi Bupati Labuhanbatu Selatan yaitu :

#### **“Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat”**

Adapun Misi Kepala Daerah terpilih sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan
- c. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN.
- d. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan
- e. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata
- f. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi dan misi pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terutama yang tertuang dalam misi ke-2 yaitu Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan.

Misi tersebut diterjemahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan kedalam tujuan yang konsisten dengan sasaran jangka menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026. Sasaran dan tujuan misi ke-2 “Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan “ dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah kabupaten labuhanbatu selatan.

#### **4.1. Tujuan**

Untuk menjabarkan visi dan misi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026 adalah : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup”.

#### **4.2. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan indikator tujuan yaitu “Angka Harapan Hidup maka sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah Menurunnya angka kesakitan dan kematian dengan indikator sasaran :

1. AKI (Angka Kematian Ibu)
2. AKB (Angka Kematian Bayi)
3. AKABA (Angka Kematian Balita)
4. Stunting
5. Prosentase Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
6. Prosentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
7. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan
8. Nilai SAKIP

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN **DINAS KESEHATAN**

#### 5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi yang dipilih, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu kepada strategi RPJMD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tertuang dalam Misi ke-2. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas kesehatan sebagai berikut :

**Strategi 1** Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, dengan arah kebijakan:

- 1.1 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan Usia Lanjut yang berkualitas dengan pendekatan continuum of care (CoC);
- 1.2 Meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
- 1.3 Meningkatkan pemenuhan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
- 1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan;
- 1.5 Meningkatkan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan, termasuk sistem informasi dan tata kelola;
- 1.6 Meningkatkan upaya kesehatan pengembangan.

- Strategi 2** Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (KADARZI), dengan arahkebijakan:
- 2.1. Meningkatkan pelayanan Gizi Masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi dan surveilans gizi.
- Strategi 3** Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, dengan arah kebijakan :
- 3.1 Meningkatkan cakupan dan mutu imunisasi;
  - 3.2 Mengendalikan faktor risiko, penemuan dan tata laksana kasus penyakit menular;
  - 3.3 Penguatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB.
- Strategi 4** Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP, dengan arah kebijakan :
- 4.1 Mengendalikan Faktor Risiko PTM yang dapat diubah dan peningkatan pelayanan PTM
- Strategi 5** Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan :
- 5.1 Meningkatkan promosi kesehatan (KIE) dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui UKBM
  - 5.2 Meningkatkan pembinaan PHBS di 5 tatanan
- Strategi 6** Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat, dengan arah kebijakan :
- 6.1 Meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan STBM
- Strategi 7** Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima, dengan arah kebijakan :
- 7.1 Meningkatkan intensitas, profesionalitas, kapasitas, dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintah daerah;
  - 7.2 Menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan

## 5.2 Arah Kebijakan

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat</b>			
<b>MISI ke-2 : Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau/assurance, terjangkau, merata dan berkeadilan</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1.1 Menurunnya Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi (AKB)	1.1.1 akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas	1.1.1.1 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan Usia Lanjut yang berkualitas dengan pendekatan <i>continuum of care</i> (CoC)
			1.1.1.2 Meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
			1.1.1.3 Meningkatkan pemenuhan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
			1.1.1.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan
			1.1.1.5 Meningkatkan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan, termasuk sistem informasi dan tata kelola
			1.1.1.6 Meningkatkan upaya kesehatan pengembangan
			1.2 Meningkatkan status gizi Balita

	1.3 Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.	1.3.1 Peningkatan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular	1.3.1.1 Meningkatkan cakupan dan mutu imunisasi
			1.3.1.2 Mengendalikan faktor risiko, penemuan dan tata laksana kasus penyakit menular
			1.3.1.3 Penguatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB
	1.4 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	1.4.1 Peningkatan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP	1.4.1.1 Mengendalikan Faktor Risiko PTM yang dapat diubah dan peningkatan pelayanan PTM
	1.5 Meningkatkan PHBS Rumah Tangga	1.5.1 Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1.5.1.1 Meningkatkan promosi kesehatan (KIE) dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui UKBM
			1.5.1.2 Meningkatkan pembinaan PHBS di 5 tatanan
	1.6 Meningkatkan jumlah Desa ODF (Open Defecation Free)	1.6.1 Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang sehat	1.6.1.1 Meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan STBM
	1.7 Meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas Manajemen Pelayanan Kesehatan	1.7.1 Optimalisasi manajemen publik dengan mengedepankan pelayanan prima	1.7.1.1 Meningkatkan intensitas, profesionalitas, kapasitas, dan kesejahteraan sumber daya aparatur pemerintah daerah
			1.7.1.2 Menyederhanakan mekanisme dan standar pelayanan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **DINAS KESEHATAN**

Indikasi rencana program prioritas OPD berisi program program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang ada di dalam RPJMD selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing- masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2021-2026 sebagaimana berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan										Kondisi Kinerja pada Akhir			
				Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025		2026		Target	Dana		
						Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana				
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
1 02 001 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
1 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2 Dokumen	5.153.227	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	5 dokumen	75.000.000
1 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	5 Program	-	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	5 dokumen	15.000.000
1 2 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	12 Dokumen	-	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	5 dokumen	15.000.000
1 2 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	5 dokumen	15.000.000
1 2 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	5 dokumen	15.000.000
1 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	1 dokumen	1.477.570	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.000.000	5 dokumen	15.000.000
1 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	5 dokumen	20.000.000
1 02 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
1 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14 bln	40.842.282.850	14 bulan	51.594.831.572	14 bulan	51.594.831.572	14 bulan	51.594.831.572	14 bulan	51.594.831.572	14 bulan	51.594.831.572	14 bulan	51.594.831.572	14 bulan	257.974.157.860
1 2 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	365 Dokumen	53.997.148	365 Dokumen	60.000.000	365 Dokumen	100.000.000	365 Dokumen	60.000.000	365 Dokumen	60.000.000	365 Dokumen	60.000.000	365 Dokumen	60.000.000	1825 dokumen	340.000.000
1 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5 dokumen	99.480.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	300.000.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	160.000.000	5 dokumen	160.000.000	25 dokumen	940.000.000
1 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1.477.570	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	5 laporan	22.500.000
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2 laporan	791.754	4 laporan	1.500.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	1.500.000	4 laporan	1.500.000	4 laporan	1.500.000	4 laporan	1.500.000	20 laporan	11.000.000
1 02 001 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		
1 2 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1 dokumen		1 dokumen	15.000.000	18 Dokumen	5.000.000	18 Dokumen	15.000.000	18 Dokumen	15.000.000	18 Dokumen	15.000.000	18 Dokumen	15.000.000	90 dokumen	65.000.000
1 2 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1 Persil	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	10 Dokumen	30.000.000	50 Dokumen	150.000.000



Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan								Kondisi Kinerja pada Akhir				
							Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025				2026		
									Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	
1	2	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	5 laporan	75.000.000
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1 Laporan		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	4 laporan	20.000.000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>2.04</b>		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan</b>					<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>15.000.000</b>		<b>75.000.000</b>	
1	2	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	50.000.000
1	2	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	25.000.000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>744.688.000</b>		<b>826.156.800</b>		<b>801.156.800</b>		<b>801.156.800</b>		<b>801.156.800</b>		<b>3.974.315.200</b>	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket			1050 paket	464.688.000	1050 Paket	511.156.800	1050 Paket	511.156.800	1050 Paket	511.156.800	1050 Paket	511.156.800	5250 Paket	2.509.315.200
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen			1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 dokumen	40.000.000
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen			1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	75.000.000
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen			1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	75.000.000
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			68 orang	50.000.000	64 Orang	25.000.000	68 orang	50.000.000	68 orang	50.000.000	68 orang	50.000.000	340 orang	225.000.000
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			32 orang	200.000.000	32 orang	250.000.000	32 orang	200.000.000	32 orang	200.000.000	32 orang	200.000.000	160 Orang	1.050.000.000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>435.000.000</b>		<b>590.000.000</b>		<b>520.000.000</b>		<b>520.000.000</b>		<b>520.000.000</b>		<b>2.585.000.000</b>	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1 paket	24.891.460	1 paket	25.000.000	18 paket	90.000.000	18 paket	90.000.000	18 paket	90.000.000	18 paket	90.000.000	73 Paket	385.000.000
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket			4 paket	80.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	8 paket	420.000.000
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12 bln	8.699.590	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	5 paket	50.000.000
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12 bln	24.620.820	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	5 paket	150.000.000
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 bln	27.403.920	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.000.000	60 Dokumen	150.000.000
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 bln	42.583.300	12 laporan	10.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	30.000.000	60 laporan	130.000.000
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15 kl	305.690.368	62 Laporan	250.000.000	36 Laporan	300.000.000	36 Laporan	250.000.000	36 Laporan	250.000.000	62 org/kali	250.000.000	180 laporan	1.300.000.000
<b>1</b>	<b>02</b>	<b>001</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>400.000.000</b>	
1	2	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	2 Unit	90.000.000	10 Unit	360.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan								Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025			
										Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	5 Unit	40.000.000
1	02	001	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.204.400.000</b>		<b>1.219.400.000</b>		<b>1.219.400.000</b>		<b>1.219.400.000</b>		<b>1.219.400.000</b>		<b>6.082.000.000</b>
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 bln	2.921.160	12 laporan	10.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	12 laporan	25.000.000	60 laporan	110.000.000
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2 item	426.165.400	19 laporan	500.000.000	19 laporan	500.000.000	19 laporan	500.000.000	19 laporan	500.000.000	95 laporan	2.500.000.000
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 bln	680.400.000	12 laporan	694.400.000	12 laporan	694.400.000	12 laporan	694.400.000	12 laporan	694.400.000	60 laporan	3.472.000.000
1	02	001	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.460.000.000</b>		<b>1.475.000.000</b>		<b>1.475.000.000</b>		<b>1.475.000.000</b>		<b>1.475.000.000</b>		<b>7.360.000.000</b>
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	36 unit	890.840.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	750.000.000
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16 unit	15.920.000	39 unit	1.200.000.000	39 unit	1.200.000.000	39 unit	1.200.000.000	39 unit	1.200.000.000	39 unit	6.000.000.000
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	0 unit	-	59 unit	60.000.000	59 unit	60.000.000	59 unit	60.000.000	59 unit	60.000.000	59 unit	300.000.000
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit			2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	250.000.000
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit					25 Unit	15.000.000	25 Unit	15.000.000	25 Unit	15.000.000	25 Unit	60.000.000
1	2	2			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas</b>				<b>80.113.328.000</b>		<b>99.663.328.000</b>		<b>83.763.328.000</b>		<b>83.763.328.000</b>		<b>83.763.328.000</b>		<b>431.066.640.000</b>
1	02	002	2.01		<b>Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>25.650.000.000</b>		<b>41.850.000.000</b>		<b>26.350.000.000</b>		<b>26.350.000.000</b>		<b>26.350.000.000</b>		<b>146.550.000.000</b>
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibanangun	unit	1	5.889.710.000	2 unit	8.000.000.000	2 unit	8.000.000.000	2 unit	8.000.000.000	2 unit	8.000.000.000	2 unit	40.000.000.000
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibanangun	unit			3 unit	2.100.000.000	4 unit	3.000.000.000	3 unit	2.100.000.000	3 unit	2.100.000.000	3 unit	11.400.000.000
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibanangun	unit	3 unit	1.500.000.000	0 unit	-	3 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.000.000.000	3 Unit	2.000.000.000	12 unit	8.000.000.000
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	unit			2 unit	800.000.000	7 Unit	2.800.000.000	2 unit	800.000.000	2 unit	800.000.000	15 paket	6.000.000.000
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	unit			9 unit	3.250.000.000	11 Unit	600.000.000	9 unit	3.250.000.000	9 unit	3.250.000.000	47 unit	13.600.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan										Kondisi Kinerja pada Akhir			
								Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025		2026					
Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana			Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana								
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	unit					3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	3 Unit	600.000.000	12 unit	2.400.000.000		
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	16.252.014.000	7 Unit	3.550.000.000	50 Unit	19.000.000.000	7 Unit	3.550.000.000	7 Unit	3.550.000.000	7 Unit	3.550.000.000	78 unit	33.200.000.000		
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	783.780.500	8 paket	3.200.000.000	60 Unit	3.000.000.000	60 Unit	3.200.000.000	60 Unit	3.200.000.000	60 Unit	3.200.000.000	60 Unit	3.200.000.000	8 paket	15.800.000.000
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	paket	1 paket	2.312.202.210	1 paket	3.000.000.000	1 paket	3.000.000.000	1 paket	3.000.000.000	1 paket	3.000.000.000	1 paket	3.000.000.000	1 paket	3.000.000.000	5 paket	15.000.000.000
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	paket	1 paket	746.783.723	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	1.500.000.000	5 paket	7.500.000.000
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pemeliharaan prasarana dan pendukung faskes	paket			17 paket	150.000.000	17 paket	150.000.000	17 paket	150.000.000	17 paket	150.000.000	17 paket	150.000.000	17 paket	150.000.000	17 paket	750.000.000
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dilakukan kalibrasi	unit	1	32.538.980	300 unit	100.000.000	300 unit	100.000.000	300 unit	100.000.000	300 unit	100.000.000	300 unit	100.000.000	300 unit	100.000.000	300 unit	500.000.000
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket	1		1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	1 Paket	200.000.000	5 paket	800.000.000
1	2	2	2.01	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga				500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.000.000.000
1	02	002	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>54.363.328.000</b>		<b>57.563.328.000</b>		<b>57.163.328.000</b>		<b>57.163.328.000</b>		<b>57.163.328.000</b>		<b>57.163.328.000</b>		<b>283.416.640.000</b>
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	552.568.596	9106 jiwa	500.000.000	9106 jiwa	500.000.000	9106 jiwa	500.000.000	9106 jiwa	500.000.000	9106 jiwa	500.000.000	9106 jiwa	500.000.000	45530 jiwa	2.500.000.000
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	1.940.811.159	8692 jiwa	2.500.000.000	8692 jiwa	2.500.000.000	8692 jiwa	2.500.000.000	8692 jiwa	2.500.000.000	8692 jiwa	2.500.000.000	8692 jiwa	2.500.000.000	43460 jiwa	12.500.000.000
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	552.568.319	8083 jiwa	500.000.000	8083 jiwa	500.000.000	8083 jiwa	500.000.000	8083 jiwa	500.000.000	8083 jiwa	500.000.000	8083 jiwa	500.000.000	40415 jiwa	2.500.000.000
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	552.568.319	33008 jiwa	500.000.000	33008 jiwa	500.000.000	33008 jiwa	500.000.000	33008 jiwa	500.000.000	33008 jiwa	500.000.000	33008 jiwa	500.000.000	165040 jiwa	2.500.000.000
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	552.568.319	46631 jiwa	500.000.000	46631 jiwa	500.000.000	46631 jiwa	500.000.000	46631 jiwa	500.000.000	46631 jiwa	500.000.000	46631 jiwa	500.000.000	233155 jiwa	2.500.000.000
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	552.568.319	202022 jiwa	500.000.000	202022 jiwa	500.000.000	202022 jiwa	500.000.000	202022 jiwa	500.000.000	202022 jiwa	500.000.000	202022 jiwa	500.000.000	1010110 jiwa	2.500.000.000
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	552.568.319	15201 jiwa	500.000.000	15201 jiwa	500.000.000	15201 jiwa	500.000.000	15201 jiwa	500.000.000	15201 jiwa	500.000.000	15201 jiwa	500.000.000	76005 jiwa	2.500.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan												Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025		2026					
										Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	400.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	500 jiwa	2.500.000.000		
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1	400.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	500 jiwa	2.500.000.000		
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1	300.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	500 jiwa	2.500.000.000		
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	400.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	500 jiwa	2.500.000.000		
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1	350.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	100 jiwa	500.000.000	500 jiwa	2.500.000.000		
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	dokumen	1	219.144.480	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 Dokumen	1.000.000.000		
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1	19.683.271.654	1 dokumen	16.000.000.000	1 dokumen	16.000.000.000	1 dokumen	16.000.000.000	1 dokumen	16.000.000.000	1 dokumen	16.000.000.000	5 Dokumen	80.000.000.000		
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	892.257.604	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	1 dokumen	550.000.000	5 Dokumen	2.750.000.000		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen					1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	4 dokumen	2.000.000.000		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	0,05	515.600.784	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	5 Dokumen	2.500.000.000		
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	892.257.604	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	5 Dokumen	2.500.000.000		
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	122.400.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	1 dokumen	500.000.000	5 Dokumen	2.200.000.000		
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	2.000.000.000		
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang					Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	2.000.000.000		
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	5 Dokumen	900.000.000		
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	16.442.376.872	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	500.000.000	5 Dokumen	2.100.000.000		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	9.368.284.800	1 Dokumen	9.659.664.000	1 Dokumen	9.659.664.000	1 Dokumen	9.659.664.000	1 Dokumen	9.659.664.000	1 Dokumen	9.659.664.000	5 Dokumen	48.298.320.000		
1	2	2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang			orang	100.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	500.000.000	Orang	2.100.000.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan										Kondisi Kinerja pada Akhir	
								Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025		2026			
Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana			Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana						
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket			Paket	500.000.000	Paket	500.000.000	Paket	500.000.000	Paket	500.000.000	Paket	2.000.000.000		
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	4 dokumen	400.000.000		
1	2	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit			1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	500.000.000	4 unit	2.000.000.000		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12 bln	24.601.940.906	17 dokumen	16.453.664.000	17 dokumen	16.453.664.000	17 dokumen	16.453.664.000	17 dokumen	16.453.664.000	85 dokumen	82.268.320.000		
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	1	1.131.536.000	5 Unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	5 unit	1.000.000.000	20 Unit	5.000.000.000		
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan			2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	8 laporan	200.000.000		
1	2	2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	dokumen			2 dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	1.200.000.000		
1	02	002	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>						<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>500.000.000</b>		
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen			1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	250.000.000		
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen			1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	5 dokumen	250.000.000		
1	2	2	2.04		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>				
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit			3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	12 unit	200.000.000		
1	2	2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit			3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	12 unit	200.000.000		
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit			3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	12 unit	200.000.000		
1	2	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>						<b>1.750.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>1.970.000.000</b>		<b>1.970.000.000</b>		<b>8.060.000.000</b>		
1	02	003	2.01		<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>						<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>100.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		
1	2	3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen			1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000		





Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Capaian 2021		Target Indikator Kinerja kerangka pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan								Kondisi Kinerja pada Akhir						
							Realisasi	Dana	2022		2023		2024		2025				2026				
									Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana	Target	Dana			
1	2	4	2.06	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Dokumen					1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000		
1	2	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>								<b>370.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>400.000.000</b>		<b>1.970.000.000</b>
1	02	005	2.01		<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>220.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>1.020.000.000</b>
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	7 Kegiatan	379.051.700	1 dokumen	220.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 Dokumen	1.020.000.000		
1	02	005	2.02		<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>								<b>150.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>200.000.000</b>		<b>950.000.000</b>
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Hari Kesehatan Nasional	dokumen	1 hari	240.401.174	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	5 Dokumen	750.000.000		
1	2	5	2.02	2	Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga					Keluarga	50.000.000	Keluarga	50.000.000	Keluarga	50.000.000	Keluarga	50.000.000	Keluarga	200.000.000		



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **DINAS KESEHATAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang indikator-indikator kinerja dari Dinas Kesehatan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026.



NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	Target Per tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>ASPEK KESEJAHTERAN MASYARAKAT</b>										
1	Angka usia harapan hidup	Tahun		Bukan kewenangan dinkes						
2	Prosentase Balita Gizi Buruk (sangat kurus)	%	0,17	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12
3	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	7,50	7,50	7,30	7,00	6,80	6,50	6,20	6,20
4	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Aspek Pelayanan Umum</b>										
<b>Kesehatan</b>										
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		2,97/1000 KH	2,97/1000 KH	3,81/ 1000 KH	3,78/ 1000 KH	3,75/ 1000 KH	3,72/ 1000 KH	3,69/ 1000 KH	3,69/ 1000 KH
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi		20,91	2,74	2,68	2,66	2,64	2,61	2,59	2,59
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		3,18	3,22	3,2	3,18	3,16	3,14	3,12	3,12
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		1,24	3,60	3,40	3,10	2,9	2,7	2,4	2,4
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		73,26	71/100.000 KH	69/100.000 KH	67/100.000 KH	65/100.000 KH	63/100.000 KH	61/100.000 KH	61/100.000 KH
6	Rasio posyandu per satuan balita		13,50	Bukan kewenangan dinkes						
7	Rasio puskesmas,poliklinik,pustu persatuan		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
10	rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	139,8	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	101	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	83,49)	85,14	87 %	90,5%	94%	97%	100%	100%
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar									
16	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	97,12	95	95	95	95	95	95	95
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		3,6	2/100.000 penduduk usia < 15 th						
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	108,7	100	100	100	100	100	100	100
19	cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis ( per 100.000 penduduk)		202/100,000	203/100,000	204/100,000	200/100,000	180/100,000	160/100,000	140/100,000	140/100,000
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis ( per 100.000 penduduk)		1,6	1,52	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS (cure rate)	%	82	83	84	85	85	85	85	85

NO.	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	Target Per tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	91,6	100	100	100	100	100	100	100
25	Penderita diare yang ditangani	%	75,46	100	100	100	100	100	100	100
26	Angka kejadian Malaria	Hanya ada kasus malaria impor								
27	Tingkat kematian akibat Malaria	Tidak ada data								
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Tidak ada data								
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	tidak ada data								
30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	Tidak ada data								
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	0	2,2	7	12	17	21	26	26
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (tidak ada data) adanya maskin peserta PBI Pusat dan Daerah	Tidak ada data								
34	Cakupan kunjungan bayi	%	102,04	100	100	100	100	100	100	100
35	Cakupan puskesmas per Kecamatan	%	150	150	150	150	150	150	150	150
36	Cakupan pembantu puskesmas per desa	%	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75
37	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100,41	100	100	100	100	100	100	100
38	Cakupan pelayanan nifas	%	101	92	93	94	95	96	97	97
39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	112,88	82%	84	85	87	90	92	92
40	Cakupan pelayanan anak balita	%	102,21	100	100	100	100	100	100	100
41	Cakupan pemberian PMT pada balita gizi kurang, sangat kurang, kurus dan sangat kurus	%	78,7	80	80	83	85	90	95	95
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	95,99	100	100	100	100	100	100	100
43	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (maskin peserta PBI Daerah))	jiwa	19166	19166	19166	19166	19166	19166	19166	19166
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi.

Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk indikator-indikator kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis 2021-2026, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

dr. DONNY IRWAN SYAH DALIMUNTHE, MKM  
PEMBINA Tk. I/ IV/b  
NIP. 19760119 200502 1 001

